

Newsletter

MERITOKRASI



KOMISI APARATUR
SIPIL NEGARA



Satu Dasawarsa KASN
Membangun Meritokrasi

EDISI VI

ISSN 2829-0321



9 772829 032005



SISTEM MANAJEMEN
ANTI PENYUAPAN



MERITOKRASI

Informatif, Komunikatif, Inspiratif

Headline

Refleksi Satu Dasawarsa KASN: Pengabdian dalam Membangun Meritokrasi Indonesia

Tepat pada 15 Januari 2024 Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menggelar refleksi satu dasawarsa KASN. Refleksi ini merupakan upaya untuk mengingat kembali perjalanan KASN dalam membangun dan mengawal meritokrasi di Tanah Air.

Ketua KASN, Agus Pramusinto, dalam sambutannya mengapresiasi seluruh kinerja dan kontribusi insan KASN. "Hari ini adalah hari untuk kita semua. Hari memperingati kegembiraan meski dalam kesederhanaan."

"Saya menyampaikan apresiasi kepada kita semua. Ada yang mengawal, mendampingi penerapan sistem merit; nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku; dan juga netralitas. Dan teman-teman di internal yang support semua itu. Semua adalah kerja keras, semua adalah komitmen kerja keras yang tinggi," ucap Agus.

Ketua KASN juga menambahkan apa yang telah dilakukan segenap insan KASN ke depannya telah tercatat sebagai sejarah perjalanan reformasi birokrasi di Indonesia.

"Saya bangga bukan karena sekadar prestasi pengawasan sistem merit. Saya bangga karena kita bisa tetap mempertahankan integritas"

Dalam refleksi ini juga dilakukan launching buku "10 Tahun KASN Membangun Meritokrasi." Buku tersebut memuat kumpulan cerita yang menggambarkan perjalanan panjang dan berharga yang telah dilalui KASN dalam mengawal prinsip meritokrasi di Indonesia. (nqa)



Ketua KASN, Agus Pramusinto, saat memberikan sambutan pada Refleksi Satu Dasawarsa KASN.

DAFTAR ISI

- 01 Refleksi Satu Dasawarsa KASN: Pengabdian dalam Membangun Meritokrasi Indonesia**
- 02 News Update**
 - Masuk Masa Transisi, KASN Dorong Adanya Fungsi Pengawasan Sistem Merit yang Efektif
 - KASN Ajak Bakohumas Gaungkan Gerakan ASN Pilih Netral
 - Kolaborasi dengan Tanoto Foundation, KASN Mendorong Akselerasi Penerapan Manajemen Talenta di Instansi Pemerintah
 - Rapat Koordinasi Penyiapan Transformasi KASN
- 03 Hot Topic**
 - Survei KASN: Pj. Kepala Daerah Kurang Optimal Tegakkan Netralitas ASN
 - Cegah Perselingkuhan ASN, KASN Tegaskan Aturan Disiplin
- 04 Voice of ASN: Bagaimana ASN Milenial Menjaga Netralitas?**
- 05 KASN Update**
 - Cegah Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilu 2024, KASN Luncurkan Slogan "ASN PILIH NETRAL"
 - KASN Pertahankan Predikat sebagai Pengelola JDIH Terbaik
 - Penandatanganan Perjanjian Kinerja
 - Capacity Building KASN
 - Rapat Penguatan Budaya Kerja KASN
- 06 Tanya Ketua KASN**
- 07 Opini: Kelinci vs Kura-kura**
- 08 Tips** Menjemput Hidup yang Lebih Bahagia dengan Digital Detox

Masuk Masa Transisi, KASN Dorong Adanya Fungsi Pengawasan Sistem Merit yang Efektif



Ketua KASN, Agus Pramusinto, membuka Anugerah Meritokrasi KASN di Yogyakarta.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menggelar Anugerah Meritokrasi untuk kali keempat, Kamis (7/12/2023). Pada gelaran yang berlangsung di Yogyakarta ini KASN memberikan penghargaan kepada 34 instansi pemerintah yang berhasil meraih kategori sistem merit "Sangat Baik" dan 96 instansi pemerintah yang masuk kategori "Baik". Di samping itu, juga terdapat 13 instansi pemerintah yang mendapatkan apresiasi setelah berhasil menerapkan manajemen talenta dalam pengisian kursi jabatan pimpinan tinggi (JPT).

Menurut Ketua KASN, Prof. Agus Pramusinto, pelaksanaan Anugerah Meritokrasi merupakan wujud keteguhan KASN dalam mengawal pengawasan penerapan sistem merit di tengah masa transisi. Disahkannya UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengubah manajemen ASN secara substansial.

"Penting bagi kita untuk memastikan bahwa perubahan ini mendukung penguatan, bukan pelemahan sistem merit. Perubahan ini termasuk mengalihkan fungsi pengawasan sistem merit dari KASN ke instansi lain."

"Meskipun demikian, kami akan terus mendorong keberadaan fungsi pengawasan sistem merit yang efektif di masa depan untuk menjaga keberlanjutan meritokrasi," ungkap Agus membuka acara.

Di samping itu, kata Agus perubahan lingkungan politik saat ini, seperti pemilu serentak dan pergantian pemerintahan, juga akan memengaruhi penerapan sistem merit khususnya terkait dengan aspek netralitas, kode etik, dan kode perilaku ASN. Para ASN perlu waspada terhadap risiko peningkatan pelanggaran netralitas ASN selama tahun politik dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang tepat.

"Netralitas bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga pemeliharaan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. ASN harus menghindari politik praktis untuk mengeliminasi konflik kepentingan dan menjaga imparialitas birokrasi," tegas Agus.

Ketua KASN lantas mengajak para ASN untuk mempertahankan integritas, profesionalisme, dan netralitas. ASN harus menjadi teladan, terutama menjelang pemilu serentak untuk menunjukkan pelayanan publik yang objektif, adil, dan bebas dari pengaruh politik.

Sementara itu, Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Abdullah Azwar Anas, mengapresiasi segenap instansi pemerintah yang telah berhasil mendapatkan predikat "Sangat Baik" dan "Baik" dalam mengimplementasikan sistem merit.

"Setiap instansi pemerintah harus memastikan sistem merit berjalan dan diawasi secara optimal dalam setiap kebijakan dan manajemen ASN melalui instrumen yang ada dan melalui digitalisasi, terutama untuk memastikan penataan karier ASN dapat berlangsung profesional."



Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menyampaikan opening remarks pada Anugerah Meritokrasi KASN secara virtual.

"Kami juga mengharapkan komitmen pimpinan sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk mewujudkan manajemen ASN yang berbasis sistem," tegas Menteri Anas.

Kata Menteri PANRB, penerapan sistem merit menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Hal tersebut sejalan dengan dua prioritas kerja Presiden Joko Widodo, yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan reformasi birokrasi.

Di sisi lain, Menteri Anas turut mengapresiasi kinerja KASN yang telah mengawasi penerapan sistem merit di setiap instansi pemerintah di Tanah Air. Ia berharap ini menjadi tonggak dari komitmen untuk memberikan pelayanan publik terbaik.

“Terima kasih untuk KASN yang konsisten untuk menjaga kualitas sistem merit di lingkungan instansi pemerintah. Saya ucapkan selamat kepada instansi yang mendapatkan nilai indeks sistem merit kategori Baik dan Sangat Baik. Semoga upaya kita untuk membentuk ASN yang profesional dan berkelas dunia, dapat memberikan dampak kepada terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan masyarakat semakin sejahtera,” Anas berpesan.

Di samping itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X, turut mengapresiasi para penerima Anugerah Meritokrasi. Ia menjabarkan bahwa di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta reformasi birokrasi telah digulirkan melalui Maklumat No. 10 Tahun 1946 tentang Perubahan Pangrèh Prâdjâ menjadi Pamong Prâdjâ.

“Esensi maklumat ini bukan hanya mengubah istilah tetapi juga tata pemerintahannya. Serupa dengan pergeseran abdi-negara ke abdi-masyarakat. Di sanalah sumber filosofi ASN itu berasal. Dari pejabat yang “dilayani” menjadi abdi masyarakat yang “melayani” rakyat,” ujarnya. Adapun konsekuensi dari pembaharuan fungsi tersebut, menurut Gubernur DIY adalah terwujudnya perilaku bermartabat ASN. Hal itu ditandai dengan tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah, dan berdosa jika melakukan penyimpangan.



Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X, dalam Anugerah Meritokrasi KASN.

Oleh karena itu, ASN bukan sekadar pekerja kantoran tetapi insan peradaban. Integritas dirinya menunjukkan sikap anti-kebodohan dan kemiskinan, yang membentuk watak anti-korupsi serta penyalahgunaan wewenang.

“Semua perubahan itu membawa serta perubahan filosofi yang fundamental: Dari “dilayani”, lalu “melayani”, dan berujung menjadi “aktor perubahan” yang “merdeka”. Yaitu merdeka dalam berpikir dan bertindak atas dasar konsep thinking and acting out of the box within the system,” jelas Gubernur DIY.

Sebagai informasi, mulai 2019 hingga akhir 2023 ini, KASN telah menilai penerapan sistem merit di 585 instansi pemerintah. Adapun hasilnya, 91 instansi pemerintah ditetapkan dalam kategori “Sangat Baik”, 157 pada kategori “Baik”, 78 pada kategori kurang, dan juga 191 instansi pemerintah dalam kategori buruk. Kemudian, dalam hal Indeks Kualitas Pengisian JPT, terdapat 63% dari 431 instansi pemerintah yang dinilai mencapai kategori “Baik” dan “Sangat Baik”. Selanjutnya, berdasarkan evaluasi tingkat kepatuhan pelaksanaan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku (NKK) ASN di instansi pemerintah, tahun ini sebanyak 62,5% dari 16 instansi pemerintah mencapai kategori “Patuh”. (nqa)



Foto bersama Komisioner KASN dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X, bersama penerima Anugerah Meritokrasi KASN.



Pimpinan KASN bersama Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong, dan para narasumber BAKOHUMAS KASN.

KASN Ajak Bakohumas Gaungkan Gerakan ASN Pilih Netral

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengajak Bakohumas untuk menyebarkan pesan netralitas birokrasi melalui slogan ASN PILIH NETRAL, Rabu (22/11/2023). Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh tren kenaikan pelanggaran netralitas ASN menjelang kontestasi Pemilu.

Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto, menyampaikan pada 2022, KASN menerima 60 pengaduan, dengan 16 (26,7%) di antaranya terbukti melanggar, dan sebanyak 10 (62,7%) sudah ditindaklanjuti oleh PPK.

“Sementara pada tahun 2023, hingga tanggal 15 November jumlah pengaduan mengalami peningkatan menjadi 201, dimana 88 (43,8%) di antaranya terbukti melanggar, dan 59 (67,1%) sudah mendapatkan tindak lanjut dari PPK,” sebut Tasdik.

Sementara itu, Asisten KASN, Iip Ilham Firman, menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi pelanggaran netralitas ASN.

“Berdasarkan pengawasan KASN, ada lima faktor utama yakni spoil system, budaya paternalistik birokrasi, intervensi politik, ketidakpahaman ASN akan regulasi, serta kekerabatan,” ujarnya.



Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto, memberikan cenderamata kepada Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong.

Iip juga menambahkan bahwa tidak jarang ASN yang memiliki otoritas dan sumber daya seringkali lengah menjaga komitmen netralitas dalam menjalani rutinitas kedinasan mereka.

“Penggunaan anggaran, aset, logistik, hingga pengerahan sumber daya manusia untuk kegiatan politik sering terjadi namun memang sulit dibuktikan,” tandasnya.

Selanjutnya, Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menekankan perlunya keterlibatan masyarakat sipil untuk mewujudkan ekosistem pemilu yang inklusif dan demokratis.

“Pertaruhan kita untuk menjaga netralitas ASN sangatlah besar. Kita tidak bisa sendiri untuk membentengi diri. Humas pemerintah harus bisa memfasilitasi masyarakat sipil agar bisa mendeteksi, menanalisis, dan mengungkap pelanggaran netralitas”, pesan Titi.

Sebagai penutup, Pengamat Sosial Media, Enda Nasution, menyimpulkan, seiring dengan maraknya intervensi politik di ruang digital, setiap humas pemerintah sebaiknya memaksimalkan kampanye slogan ASN PILIH NETRAL baik melalui penggunaan logo, twibbon, maupun penyebaran poster edukasi pentingnya netralitas.

Diharapkan upaya ini dapat meneguhkan komitmen netralitas ASN dalam mengejar mimpi netralitas birokrasi. (jkh/nqa)



Komisioner KASN, Sri Hadiati Wara Kustriani, bersama Head of Leadership Development and Scholarship, Tanoto Foundation, Michael Susanto, (kiri) dan Kepala Badan Kepegawaian daerah (BKD) Pemerintah Provinsi Bali, Ketut Lihadnyana (kanan).

Kolaborasi dengan Tanoto Foundation, KASN Mendorong Akselerasi Penerapan Manajemen Talenta di Instansi Pemerintah

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menjalin kolaborasi dengan Tanoto Foundation dalam upaya mendorong akselerasi manajemen talenta di instansi pemerintah. Menurut Komisioner KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah 1, Sri Hadiati Wara Kustriani, kolaborasi ini dibutuhkan demi mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi.

“Ini merupakan kolaborasi pertama kali meskipun kita beberapa kali sudah menjadi bagian dari kerja sama Tanoto dengan instansi lain. Kita membutuhkan kolaborasi atau kerja sama dari semua pihak untuk bisa meningkatkan profesionalitas dari ASN di Republik Indonesia,” terang Sri Hadiati dalam sambutannya pada *Community of Practice (CoP)* “Akselerasi Manajemen Talenta dalam Pengembangan Karier PNS”, di Jakarta Selatan, Rabu (13/9/2023).

Komisioner KASN itu kemudian menyebut, pada rapat koordinasi kali ini diikuti oleh tiga pemerintah provinsi, 16 pemerintah kabupaten, dan 11 pemerintah kota. KASN sampai saat ini terus berupaya memberikan masukan desain dalam menyusun manajemen talenta sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN. Dengan demikian, manajemen talenta ke depannya dapat menggantikan proses seleksi terbuka yang selama ini cukup menguras tenaga, waktu, dan biaya.

Sri Hadiati melanjutkan, melalui forum CoP ini diharapkan instansi pemerintah yang hadir dapat saling berbagi informasi termasuk jika menemukan kesulitan dalam implementasi manajemen talenta. “Niatnya manajemen talenta ini dibangun untuk memudahkan kita memetakan kebutuhan-kebutuhan masing-masing ASN. Ibu dan bapak sekalian, saya yakin pemahaman kita terhadap sistem merit dan manajemen makin baik, kohesif, dan kondusif.”

“Kami yakin, kami optimistis bahwa jumlah instansi yang berhasil menetapkan manajemen talenta terus meningkat. Mudah-mudahan dengan *Community of Practice* ini, instansi-instansi pemerintah akan berani menerapkan manajemen talenta,” Sri Hadiati berharap.

Senada dengan Komisioner KASN, *Head of Leadership Development and Scholarship*, Tanoto Foundation, Michael Susanto, mengatakan bahwa penerapan manajemen talenta menjadi strategi pamungkas dalam usaha penguatan kompetensi dan pengelolaan ASN di Tanah Air. Kebijakan ini dapat mendukung para ASN untuk bertransformasi sehingga potensi yang ada dapat terus dikembangkan dan dapat berkontribusi terhadap pembangunan nasional ke depannya.

“Hal ini sejalan dengan keyakinan pendiri Tanoto foundation. Mereka percaya bahwa setiap individu termasuk tentunya di dalamnya para ASN yang mengemban tugas cukup besar bagi negara ini harus mempunyai kesempatan dalam mengembangkan kompetensinya secara menyeluruh,” ungkap Michael. Ia menambahkan, pengembangan manajemen talenta ASN sebagai prioritas nasional, menjadi sasaran pokok reformasi birokrasi berdampak dalam peningkatan stabilitas segala aspek kehidupan bernegara.

“Selain itu, kami percaya akselerasi manajemen talenta akan mampu mendorong penciptaan talenta-talenta terbaik sehingga Indonesia bisa menyongsong target-target pembangunan berkelanjutan,” imbuhnya.



Komisioner KASN, Sri Hadiati Wara Kustriani, memaparkan materi *Community of Practice (CoP)* “Akselerasi Manajemen Talenta dalam Pengembangan Karier PNS”.

Sebagai informasi, dalam forum ini juga dilakukan sharing session oleh instansi pemerintah yang telah membangun manajemen talenta, yakni Kepala Badan Kepegawaian daerah (BKD) Pemerintah Provinsi Bali, Ketut Lihadnyana; Kepala Bagian Pengembangan Karir Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri, Aji Fauzi Farsa; dan Pranata Komputer BKD Pemprov Bali, I Nyoman Swantara. (nqa)

Rapat Koordinasi Penyiapan Transformasi KASN



Rapat Koordinasi Penyiapan Transformasi KASN bersama Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, di kantor KASN.



Ketua KASN, Agus Pramusinto, memberikan buku "10 Tahun KASN Membangun Meritokrasi" kepada Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melangsungkan Rapat Koordinasi Penyiapan Transformasi KASN bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, di kantor KASN, Senin (15/1/2023). Pada rapat koordinasi tersebut Menteri PANRB mengapresiasi peran KASN selama satu dasawarsa ini dalam mengawasi penerapan sistem merit.

"KASN menjadi simbol bagi merit sistem bisa diterapkan. Apresiasi terhadap peran KASN saat ini," sebut Menteri Anas. Ke depan, Menteri PANRB berharap supaya pengawasan pelanggaran sistem merit dalam manajemen ASN dapat terus dijaga. Kemudian pada tahun politik, ia berharap netralitas ASN dapat terus dioptimalkan.

Di satu sisi, terkait dengan transisi, pihaknya terus mengupayakan akselerasi mengenai apa yang disampaikan dalam rapat koordinasi.

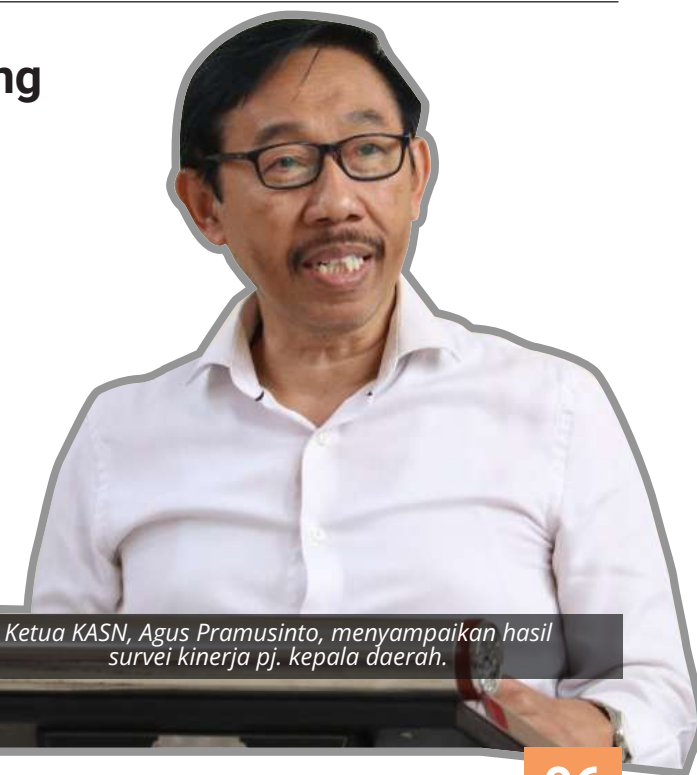
Sementara itu, Ketua KASN, Agus Pramusinto, mengatakan adanya perubahan diharapkan tidak mengganggu kontribusi KASN. "Di usia KASN yang 10 tahun ini, perubahan tetap harus terjadi, tapi kita bisa tetap memberikan kontribusi kepada bangsa," ungkap Agus. (nqa)

Hot Topic

Survei KASN: Pj. Kepala Daerah Kurang Optimal Tegakkan Netralitas ASN

Hasil survei terbaru Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menunjukkan pejabat (pj) kepala daerah yang ada saat ini belum cukup optimal dalam mengawal netralitas ASN. Bahkan empat pejabat di antaranya diduga melanggar netralitas berdasarkan laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kepada KASN per Desember 2023.

Menurut Ketua KASN, Agus Pramusinto, intervensi politik masih menjadi biang utama yang membuat ASN melanggar netralitas. Oleh karena itu, pj. kepala daerah pada momen ini memegang peran penting dalam menjaga netralitas di lingkup birokrasi.



Ketua KASN, Agus Pramusinto, menyampaikan hasil survei kinerja pj. kepala daerah.

"Tugas seorang pj. kepala daerah tidak mudah karena harus menjamin kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik di daerah yang mengalami kekosongan jabatan. (Hal itu) termasuk menjaga birokrasi dan politik dengan berlandaskan netralitas mengacu kepada Permendagri Nomor 4 Tahun 2023," terang Agus dalam sambutannya pada webinar "Penjabat Kepala Daerah Sudahkah Netral?" di Jakarta, Selasa (19/12/2023).

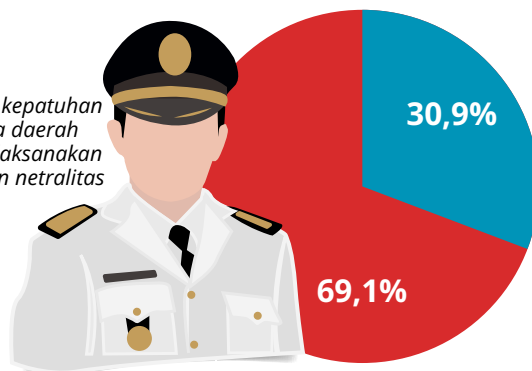
Agus melanjutkan, ada tiga hal yang harus dimiliki pj. kepala daerah supaya dapat menegakkan netralitas ASN pada tahun politik. Pertama, mereka harus terbebas dari beban politik dari pihak yang mengusulkan mereka menjadi pj. kepala daerah.

Kedua, pj. kepala daerah tidak boleh terpengaruh dengan konflik kepentingan di daerah. Upaya tersebut akan berhasil kata Agus jika pj. kepala daerah tidak memiliki kepentingan pribadi sehingga menghindari benturan konflik kepentingan.

Ketiga, pj. kepala daerah semestinya tidak ikut serta dalam pilkada 2024. "Keikutsertaan kepala daerah ini berpotensi terjadi, mengingat belum ada regulasi yang melarang. Hal ini mendorong pj. kepala daerah membangun investasi politik yang dalam prosesnya akan mencederai netralitas ASN di instansinya," beber Agus.

Di samping itu, Asisten KASN, lip Ilham Firman, memaparkan dari total 101 pj. kepala daerah, rerata baru 31 orang (30,9%) yang melaksanakan peraturan netralitas ASN. Sementara, terdapat 70 Pj (69,1%) yang tidak mematuhi ketentuan netralitas di masa kepemimpinan mereka.

Diagram kepatuhan pj. kepala daerah yang melaksanakan peraturan netralitas ASN.



lip turut menyampaikan perlunya menjaga netralitas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

"Yang perlu menjadi perhatian bersama adalah masih kurangnya perhatian terhadap potensi pelanggaran Netralitas PPPK dan PPNPN, padahal jumlah PPPK dan PPNPN cenderung lebih banyak dari pada jumlah ASN. Dan instansi pemerintah berkewajiban mengatur disiplin PPPK. Hanya ada tujuh daerah yang memiliki aturan netralitas bagi PPPK dan hanya 14 daerah yang memiliki aturan netralitas PPNPN," lip menyebutkan.

Lebih lanjut, masa depan pengawasan netralitas ASN juga menjadi tanda tanya ke depannya menurut Direktur Eksekutif Lingkaran Madani, Ray Rangkuti. "Lembaga pengawas yang independen sangat diperlukan dalam manajemen ASN. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana nantinya Pemilu yang akan datang tanpa KASN," ungkap Ray.

Sebagai informasi, dalam webinar kali ini turut hadir sebagai narasumber Inspektur Khusus Itjen Kemendagri, Teguh Narutomo dan Pj. Bupati Kulon Progo, Ni Made Dwipanti Indrayanti. (nqa)



Cegah Perselingkuhan ASN, KASN Tegaskan Aturan Disiplin

Perselingkuhan dan permasalahan rumah tangga merupakan jenis pelanggaran kode etik yang paling banyak dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada periode 2020 – 2023, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menemukan 172 pelanggaran terkait permasalahan rumah tangga termasuk perselingkuhan dari total 676 pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN baik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Jumlah tersebut belum termasuk pelanggaran sejenis yang ditangani oleh unit pengawas tiap instansi. Hal itu disampaikan Ketua KASN Agus Pramusinto pada webinar bertajuk "Perselingkuhan ASN: Cinta Terlarang, Masalah Menghadang" yang diselenggarakan oleh KASN pada Rabu (30/8/2023).

Kendati perselingkuhan di kalangan ASN tinggi, Agus menyoroti lambannya penanganan kasus perselingkuhan ASN pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. "Beberapa faktor penyebabnya antara lain adanya benturan kepentingan di antara para pihak yang berkepentingan dan adanya pandangan bahwa perselingkuhan merupakan persoalan pribadi," terang Agus.

Lebih lanjut, psikiater Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang, dr. Santi Yuliani, menuturkan tentang fenomena perselingkuhan atau pelanggaran sebuah kepercayaan, pengkhianatan atau pemutusan kesepakatan dalam hubungan. Menurutnya, terdapat tiga tahapan ketika seseorang melakukan selingkuh, yaitu lust (nafsu), attraction (ketertarikan), dan attachment (keterikatan).

Fase lust adalah pintu masuk perselingkuhan yang merupakan kondisi psikologis yang memunculkan nafsu karena hormon testosteron dan estrogen mendominasi. Kemudian, pada fase attraction, seseorang akan makin mencari tahu mengenai informasi tentang orang yang menarik baginya sebagai bentuk reward. Begitu dilanjutkan, seseorang akan masuk ke emotional affair.

"Pada tahap emotional affair, seseorang yang selingkuh mulai berdandan ke kantor, mulai bohong ke pasangannya, mulai menghabiskan waktu di kantor lebih lama, kalau bisa dinas di luar kota, atau mulai *texting-texting* tanpa diketahui pasangannya," ucap dr. Santi.

Ketika gejala tersebut tidak diobati, selanjutnya akan masuk ke fase attachment di mana hormon yang terlibat adalah *vasopressin* dan *oxytocin* sehingga sulit untuk dipisahkan. Di satu sisi, perselingkuhan dapat mengakibatkan dampak yang buruk secara individu baik terhadap korban maupun pelaku. dr. Santi menjelaskan, korban perselingkuhan membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk bisa masuk ke dalam pemulihan.

"Bagi pelaku perselingkuhan, dalam jangka panjang dapat mengakibatkan stress hingga terjangkau sakit jantung, depresi, stoke, bahkan suicide karena capek tidak bisa menyelesaikan permasalahan perselingkuhannya," ujar dr. Santi.

Selain dampak negatif terhadap individu, perselingkuhan yang terjadi pada ASN tentu akan mengganggu pekerjaannya yang biasa dilakukan sehari-hari. Di akhir sesi, ia menyampaikan pesan, selingkuh bukanlah solusi dari masalah tetapi justru menambah masalah.

"Menjadi ASN juga menjadi role model, bukan hanya terkait mampu berprestasi tapi juga mampu mengontrol diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri," pesan dr. Santi.

Sementara itu, Asisten KASN, Pangihutan Marpaung menyampaikan bahwa larangan perselingkuhan bagi ASN telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

Marpaung menjelaskan, Pasal 14 PP Nomor 45 Tahun 1990 melarang PNS hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. "Dalam aturan kepegawaian tidak dikenal istilah perselingkuhan, melainkan hidup bersama atau melakukan hubungan sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah," ucap Marpaung.

Marpaung menambahkan, terhadap PNS yang melanggar ketentuan pasal di atas, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, yang meliputi:

- 1 Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;**
- 2 Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; atau**
- 3 Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.**

Selanjutnya, ia mengingatkan, perbuatan perselingkuhan bukan hanya berdampak kepada ASN yang melakukannya, tapi juga dapat merugikan pihak lain seperti keluarga, instansi, bahkan korps ASN. "Sesuai dengan Core Values ASN, maka mari kita wujudkan ASN BerAKHLAK dalam kehidupan sehari-hari," kata Marpaung.

KASN berharap webinar ini dapat meningkatkan kesadaran bagi para ASN untuk mencegah terjadinya berbagai pelanggaran moralitas dan kode etik, serta mendorong instansi pemerintah melakukan pengawasan internal untuk pencegahan dan perlindungan kepada ASN. *(nr/pfs/nqa)*

Bagaimana ASN Milenial Menjaga Netralitas?



Rizkynta Jaya Ginting

Plt. Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat

Menurut saya pelanggaran netralitas itu seperti pengendara yang berkendara melawan arah dengan alasan agar lebih cepat sampai. Terkadang berkendara sesuai aturan memang memerlukan waktu yang lebih lama dibanding berkendara melawan arah. Berkendara melawan arah dilarang karena berbahaya bagi si pengendara dan juga bagi pengendara lainnya. Untuk mencegah pengendara berkendara melawan arah maka diperlukan pengawas-pengawas yang siap menegur bahkan memberikan sanksi bagi pengendara yang melawan arah. Tidak adanya pengawas di jalanan tentu akan memberi celah pengendara yang tidak berintegritas untuk terus berkendara melawan arah, bahkan bukan tidak mungkin akan mempengaruhi pengendara yang sebelumnya sudah baik, menjadi ikut-ikutan berkendara melawan arah. Akibatnya akan timbul masalah baru, mulai dari kemacetan hingga kecelakaan.

Pelanggaran netralitas ASN juga kerap sengaja dilakukan oknum ASN karena ada keinginan untuk "lebih cepat sampai tujuan". Tujuan adalah harapan ASN untuk promosi jabatan, atau bahkan supaya dapat mempertahankan jabatan saat ini. Hal ini tentu saja dapat diminimalkan dengan hadirnya lembaga yang bertugas menjaga netralitas ASN. Lembaga tersebut harus bekerja keras agar tidak ada celah pelanggaran netralitas ASN. Ketiadaan lembaga yang menjaga netralitas ASN, akan membuka celah pelanggaran netralitas makin masif karena bisa saja ASN yang sudah berintegritas menjadi ikut-ikutan melanggar netralitas karena merasa hal tersebut tidak memiliki dampak negatif. Dampaknya bila ini terjadi adalah akan muncul masalah-masalah baru dalam pelayanan publik. Mulai dari diskriminasi pelayanan publik dan seterusnya. Alhasil, reformasi birokrasi yang sudah dibangun selama ini menjadi terlupakan.



Dina Khairani

Analisis Kerja Sama Lintas Sektor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), setiap pegawai ASN memiliki kewajiban untuk menjaga netralitas, yakni dengan tidak berpihak kepada segala bentuk pengaruh manapun, dan tidak memihak kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara. Dikaitkan dengan agenda besar pesta demokrasi 2024, asas netralitas mewajibkan pegawai ASN agar tidak terlibat politik praktis dan tidak menunjukkan dukungan terhadap calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah, maupun calon anggota legislatif, secara terang-terangan kepada publik. Sebab ketidaknetralan pegawai ASN berpotensi memengaruhi dan berpeluang menimbulkan penyalahgunaan wewenang kepada bawahan maupun masyarakat. Belum lagi mempertimbangkan status pejabat pembina kepegawaian (PPK) ASN yang masih dipegang oleh pejabat politik yang dinilai dapat mengintervensi kedudukan pegawai ASN secara politis di masa depan.

Meskipun demikian, sebagai warga negara, pegawai ASN menurut saya memiliki hak, sekaligus kewajiban, untuk memilih calon pemimpin bangsa. Dengan demikian, menjaga netralitas bukan berarti bersikap tak acuh atau pun putus asa terhadap hasil dari agenda besar nasional ini. Sebelum menentukan pilihan, kita harus memiliki pikiran yang terbuka dan aktif mencari informasi terkait rekam jejak sekaligus visi dan arah kebijakan setiap calon pemimpin untuk masa depan negara; menyaksikan berbagai forum diskusi pakar dan ahli; dan mengikuti perkembangan isu terutama terkait kegiatan kampanye calon pemimpin yang akan dipilih.

Selanjutnya, karena potensi pengaruh yang dimilikinya, saya berharap setiap pegawai ASN, pejabat, terutama pimpinan, memiliki kesadaran dan komitmen untuk berupaya mematuhi nilai-nilai Pancasila, menjaga integritas yang baik sebagai pelayan publik, menjaga netralitas dan imparialitas sehingga tidak membedakan pelayanan berdasarkan latar belakang tertentu, dan berupaya untuk bersikap jujur dan adil dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewajiban.

Cegah Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilu 2024, KASN Luncurkan Slogan “ASN PILIH NETRAL”



Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meluncurkan slogan #ASNpilihNETRAL sebagai upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN pada pemilu 2024, Rabu (15/11/2023). Slogan ini hadir dalam bentuk logo, poster, dan twibbon yang dapat diunduh melalui tautan bit.ly/ASNpilihNETRAL.

Ketua KASN, Prof. Agus Pramusinto, mengimbau supaya slogan tersebut dapat digunakan dan diunggah secara bersama-sama oleh seluruh ASN di Tanah Air melalui akun media sosial mereka. Dengan demikian, hal itu dapat menjadi gerakan serta bagian dari komitmen netralitas dan integritas ASN yang perlu terus-menerus diingatkan dan dijaga bersama.

Agus juga menegaskan, logo, poster, dan twibbon #ASNpilihNETRAL bukan hanya sekadar simbol, melainkan sebagai komitmen nyata ASN untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik dengan berbagai kepentingan mereka. “Setop pelanggaran netralitas dan semoga ASN makin profesional dan dipercaya masyarakat luas,” kata Agus.

Lebih lanjut, gelaran pemilu yang akan berjalan sekitar 90 hari lagi, diprediksi akan diwarnai oleh berbagai kepentingan politik. “Sebagaimana kita ketahui bahwa rangkaian prosesi Pemilu 2024 sangat rawan dengan pelanggaran Netralitas,” lanjut Agus.

Menurut Agus, KASN sebagai lembaga pengawas independen tentu berharap bahwa berbagai pelanggaran yang terjadi di lingkungan birokrasi dan ASN kementerian/lembaga/daerah dapat makin berkurang dari jumlah 1.678 pelanggaran netralitas ASN pada periode 2020 —2022 yang lalu. Berdasarkan data KASN, terdapat pelanggaran netralitas dengan motif pemanfaatan sumber daya birokrasi, baik berupa dukungan program, sarana dan prasarana serta aktivitas keberpihakan kepada calon tertentu.

Dihadapkan dengan kondisi tersebut, KASN tetap berpartisipasi melaksanakan tugas pengawasan netralitas dengan pendekatan pencegahan, perlindungan ASN, dan mendorong aktivasi pengawasan internal setiap instansi pemerintah. (*jkh/nqa*)

KASN Pertahankan Predikat sebagai Pengelola JDIH Terbaik

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meraih penghargaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional Terbaik Ketiga Tahun 2023 Kategori Lembaga Non Struktural (LNS). Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, kepada Kepala Sekretariat KASN, Nurhasni, yang mewakili Ketua KASN, di Jakarta, Kamis (12/10/2022).

Penghargaan ini menurut Nurhasni merupakan hasil kerja keras dari segenap tim JDIH KASN. “Penghargaan ini kita harapkan menjadi semangat kita untuk bisa tetap maju, untuk mewujudkan dokumentasi dan informasi hukum yang luar biasa, yang bisa memberikan informasi kepada publik,” ucap Nurhasni selepas menerima penghargaan.



Kepala Sekretariat KASN, Nurhasni, menerima penghargaan pengelola JDIH terbaik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly.

“Kita berharap JDIH KASN tetap terus maju, tetap memberikan informasi yang akurat untuk bisa dimanfaatkan oleh publik,” imbuhnya.

Sementara itu, Menkumham mengapresiasi berbagai instansi yang telah memajukan JDIH hingga menjadi satu khazanah hukum yang dapat menjadi referensi bagi publik.

“Ini adalah tugas kita sebagai pelayan masyarakat adalah memperbaiki, mengembangkan, dan menyebarluaskan isi dari JDIHN,” ujar Yasonna. Di samping itu, Yasonna juga menggarisbawahi salah satu hambatan terbesar dalam akses terhadap informasi hukum dan publik adalah kompleksitas bahasa dalam ranah hukum.

“Hukum dan bahasanya mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Hal ini memberikan tanggung jawab baru kepada pemerintah untuk mendekatkan informasi hukum kepada masyarakat. Pemerintah membutuhkan pendekatan baru dalam mengelola komunikasi kebijakannya kepada publik dengan media yang lebih membumi,” pesan Yasonna.

Sebagai informasi, ini merupakan kali ketiga bagi JDIH KASN meraih penghargaan Pengelola JDIH Nasional Terbaik dari Kemenkumham. Dalam pengelolaannya, JDIH KASN terus bertransformasi menjadi sumber rujukan produk-produk hukum KASN yang lengkap, responsif, dan mudah diakses. *(nqa)*

Penandatanganan Perjanjian Kinerja



Para komisioner KASN, kepala sekretariat KASN, dan asisten KASN pada saat penandatanganan perjanjian kinerja 2024.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Januari–April 2024 sekaligus penyerahan SK kenaikan pangkat pegawai dan penyampaian progress rencana penyaluran pegawai KASN, Selasa (20/2/2024). Perjanjian Kinerja ini merupakan wujud nyata komitmen KASN untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja pegawai dan sebagai dasar penilaian keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran KASN. Pada 2023 lalu, KASN telah selesai melaksanakan program kerja dan anggaran tahun 2023 dengan rata-rata capaian kinerja organisasi sebesar 105.2%.

Ketua KASN, Agus Pramusinto membuka acara dan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan penyerahan SK kenaikan pangkat bagi 15 Orang PNS KASN.

Sebagai informasi, kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto; Komisioner KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah 1, Sri Hadiati Wara Kustriani; Komisioner KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah 2, Mustari Irawan; Komisioner KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN dan Netralitas ASN, Arie Budhiman; Kepala Sekretariat KASN, Nurhasni; para asisten KASN; dan seluruh pegawai KASN. *(sa)*



Kepala Sekretariat menandatangani perjanjian kinerja di hadapan komisioner KASN.



Para komisioner KASN dengan pejabat struktural KASN pada saat penandatanganan perjanjian kinerja 2024.

Capacity Building KASN



Capacity building KASN untuk merawat organisasi dan internalisasi core values ASN Ber-AKHLAK.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melangsungkan kegiatan *capacity building* selama dua hari di 5G Resort Cijeruk, Kamis - Jumat, (23 – 24/11/2023). Kegiatan yang diikuti oleh segenap pejabat dan pegawai KASN ini dilakukan sebagai upaya merawat organisasi dan internalisasi *core values* ASN Ber-AKHLAK.



Ketua KASN, Prof. Agus Pramusinto, menyampaikan bahwa dengan mengusung tema **One Team One Dream for Meritocracy**, harapannya segenap insan KASN dapat terus berkolaborasi dalam harmoni untuk mengawal dan mengawasi implementasi sistem merit di birokrasi Indonesia. (jkh)



Rapat Penguatan Budaya Kerja KASN

Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melangsungkan rapat penguatan budaya kerja KASN pada 26 Januari dan 1 Maret 2024. Rapat tersebut bertujuan untuk membangun kebersamaan dan hubungan yang harmonis di antara insan Sekretariat KASN.

Adapun rapat penguatan budaya kerja dilaksanakan sekali setiap bulannya. Rapat diisi dengan *knowledge sharing* dan penyampaian informasi terkini dari Kepala Sekretariat KASN, Nurhasni. Selanjutnya, kegiatan diisi dengan tukar kado dengan tema yang berbeda per bulannya, seperti wewangian pada 26 Januari 2024 dan sembako pada 1 Maret 2024. Sebelumnya, peserta mengawali rapat dengan makan siang bersama.

Dalam kesempatan itu Kepala Sekretariat menekankan pentingnya kedisiplinan kepada setiap pegawai Sekretariat KASN. Komitmen untuk terus memberikan kinerja maksimal juga dibutuhkan, termasuk jelang memasuki bulan suci Ramadan. (nqa)



Suasana rapat penguatan budaya di Sekretariat KASN.

Agus Pramusinto hampir menghabiskan separuh lebih perjalanan kariernya sebagai akademisi. Namanya santer terdengar di berbagai universitas di berbagai penjuru negeri. Semua menaruh hormat pada dedikasinya sebagai guru besar kebijakan publik. Namun, 4,5 tahun terakhir, ia membuka perjalanan baru dengan menjadi ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Ini membawa warna tersendiri bagi kehidupan Agus selanjutnya.

Jika dulu sebagai akademisi dia lebih akrab dengan buku dan teori, maka ketika menjadi Ketua KASN, dia tahu proses pembuatan kebijakan publik, khususnya dalam hal manajemen ASN. Dari situ Agus bisa mengonfirmasi, apakah antara teori dengan praktik sudah selaras atau belum.

Sebagai ketua KASN yang berasal dari institusi pendidikan, Agus juga dikenal kerap mendorong para pegawai KASN yang mayoritasnya adalah milenial untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya. Baginya, pendidikan menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas kinerja pada masa mendatang.

Kedekatannya dengan para pegawai milenial itu kemudian membuat tim Humas KASN menginisiasi program Pegawai Bertanya, Ketua KASN Menjawab. Di sini ada berbagai pertanyaan dari pegawai KASN mengenai kepemimpinan, motivasi, dan juga masa depan manajemen ASN.



Ketua KASN,
Agus Pramusinto

Pegawai Bertanya, Ketua KASN Menjawab

Maurits Jonathan - *Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat*

Apa harapan Bapak di masa mendatang untuk rekan-rekan muda aparatur sipil negara?

- Saya kira ASN tetap bekerja profesional ya, di mana pun posisinya. Walaupun kebijakan bisa berubah kapan pun, tugas pokok melayani tetap harus nomor satu. Berarti ya tingkatkan kompetensi, tingkatkan kinerja, bekerja lebih profesional.

Apa pendapat Bapak tentang yang muda maju untuk memimpin?

- Ya saya kira dalam era seperti sekarang ini ukurannya bukan tua muda tapi ukurannya adalah kompetensi dan profesionalisme. Kalau anak muda bisa bekerja lebih profesional dibandingkan yang lebih senior, tentu dia punya hak untuk bisa berkariyer lebih cepat. Hanya saja, posisi atau jabatan jangan kemudian menjadikan diri merasa sok paling pintar. Berprestasilah sampai tinggi tetapi berperilaku tetap rendah hati atau humble.

Rahmizal Zakiyamar - *Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah 2*

Sebagai ketua KASN yang homebasenya bukan di Jakarta dan jauh dari keluarga, sepulang dari kantor kegiatan apa yang dilakukan, langsung pulang ke rumah atau ada kegiatan after office seperti hangout dengan rekan-rekan lain. Kalau ada, tempat favouritenya di mana Pak?

- Selain di KASN, saya memegang beberapa asosiasi. Ada Indonesian Association for Public Administration (IAPA), yang kegiatannya banyak dan saya sebagai ketua. Saya juga President Asian Association for Public Administration (AAPA), yang sekarang ini mulai bergerak karena harus membenahi organisasi dulu yang sebelumnya dipegang ketuanya dari China.

AAPA juga sedang menyiapkan international conference. Ketiga saya juga sekarang ini mendapat amanah sebagai Ketua Majelis Akreditasi untuk Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK). Ini membawahi kira-kira 20 jenis program studi seluruh Indonesia. Peran saya adalah memastikan kebijakan-kebijakan LAMSPAK tertata sebelum beroperasi. Banyak sekali kebijakan yang harus disusun dan diputuskan melalui rapat zoom.

Saya juga masih menjalankan tugas-tugas mengajar. Selain di UGM sendiri saya sering diminta ceramah lewat zoom untuk kampus-kampus anggota IAPA. Webinar internasional juga cukup sering baik dari AAPA, EROPA (Eastern Regional Organization for Public Administration), AGPA (Asian Group for Public Administration) dan EGPA (European Group of Public Administration).

Tapi di sela-sela kegiatan tersebut, saya masih sempat olah raga jalan kaki rutin 9,000-11,000 langkah setiap hari. Kadang diajak ngopi sambil ngobrol ringan tentang berbagai isu dengan teman-teman yang di Jakarta atau di Yogya. Silaturahmi dan menjalin persahabatan tetap penting. Dengan teman SMP, SMA, kuliah dll.

Chici Angelina Elizabeth - *Bagian SDMU*

Apa hal berkesan/pengalaman berkesan selama menjadi Ketua KASN?

- Ya, tentu saya di sini memahami bagaimana dinamika pembuatan kebijakan di dalam manajemen ASN maupun isu kebijakan yang lain. Selama ini saya lebih banyak berkuat dengan buku-buku yang penuh teori dan penelitian lapangan.

- Pengalaman di birokrasi menjadi konfirmasi bahwa ada proses kebijakan yang sering kali jauh dari teori. Misalnya ketika orang membuat kebijakan harusnya kan ada diskusi atau debat yang substantif terhadap masalah yang dihadapi, tapi justru ada yang tidak mau berdebat dan menganggap diri paling tahu. Ada yang membuat kebijakan tidak berbasis pada kajian akademik, tidak ada diskusi publik dan tidak ada simulasi kebijakannya.

Nesia Qurrota A'yuni - *Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan*

Masyarakat

Prof, bagaimana cara memotivasi diri untuk menghadapi realitas yang tidak berjalan seperti yang kita kehendaki?

- Menurut saya masa depan itu tetap misteri, walaupun kita tetap harus merencanakan. Untuk itu pilihannya adalah kita tetap bekerja yang terbaik. Karena kalau bekerja baik saja belum tentu hasilnya baik apalagi kalau bekerjanya seandainya. Kalau bekerjanya tidak bagus pasti hasilnya tidak bagus. Maka pilihannya adalah bekerjalah yang terbaik, karena tugasnya melayani berilah pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Iqbal Fadil - *Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat*

Bagaimana pendapat dan pandangan bapak dalam ruang lingkup Nasional mengenai pembangunan meritokrasi dalam manajemen ASN kedepan pasca terjadinya transformasi kelembagaan KASN setelah direvisinya UU 5/2014 menjadi UU 20/2023?

- Setidaknya 4 tahun belakangan kita serius mengawal sistem merit, kita benahi mulai dari seleksi terbuka yang kemajuannya signifikan walaupun di sana-sini masih ada kelemahan. Kita juga memastikan pengawalan nilai dasar kode etik kode perilaku serta netralitas ASN sebagai hal yang penting dalam birokrasi. Dan yang ketiga, kita juga kerja keras membangun sistem merit dan manajemen talenta di instansi pemerintah.

Dan dari sisi hasil saya kira bisa dilihat bahwa ada kemajuan yang luar biasa. Nah, ketika ini dipindah ke instansi yang lain tentu harapannya kinerjanya akan menjadi lebih baik. Tetapi dengan kondisi organisasi yang berbeda saya agak menyangsikan, misalnya, BKN itu apakah cukup kuat untuk mengawal semuanya karena yang dibutuhkan sebetulnya lembaga independen yang tidak bisa diintervensi secara politik. BKN saya pandang sebagai lembaga eksekutif yang posisinya sulit untuk mengawasi secara independen.

Walaupun demikian, saya tetap berharap kinerja dalam pengawasan sistem merit nanti lebih bagus. Kecepatan pelayanan harus tetap dan bahkan lebih cepat serta integritas dalam pelayanan yang menerapkan manajemen anti suap semakin diperkokoh. Di KASN sudah membuktikan bahwa sepanjang yang saya ketahui kita cukup bersih, tidak ada tarikan-tarikan (suap-suap untuk memudahkan urusan). Mudah-mudahan di tempat lain bisa dipertahankan bahkan lebih baik, pelayanannya lebih cepat.

Ria Okta Dewi - *Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Pengisian JPT Wilayah 1*

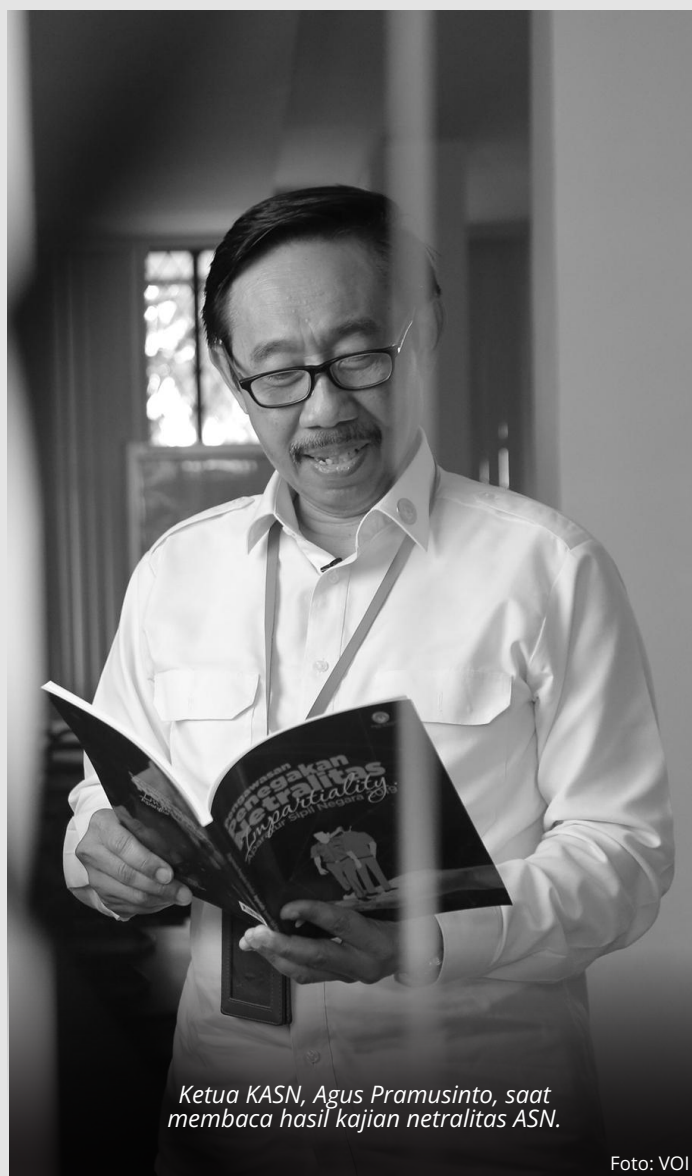
Apa tantangan ke depan KASN selama ini menjadi lembaga yang independen dan bagaimana tetap dapat menjaga independensinya?

- Saya kira itu tantangan yang berat karena nilai yang kita kembangkan di sini harus masuk dalam ruang dengan tubuh yang berbeda. Kira-kira di sana apakah cocok lingkungan barunya dengan nilai yang kita tanam? Ibaratnya, pohon yang sudah cukup kuat kita tanam di sini apa cocok dengan tanah yang ada di sana. Jangan sampai pohonnya layu dan mati.

Edwin Apriyanto - *Bagian Keuangan*

Apakah fungsi yang diemban KASN sesuai UU nomor 5 tahun 2014 akan terus eksis setelah ada nya UU no 20 Tahun 2023 yang menyatakan KASN dihapus?

- Secara kelembagaan kita memang hilang dan itu yang kita khawatirkan. Padahal pengawasan yang efektif membutuhkan organisasi pengawasan yang cukup kuat. BKN itu tradisinya berbeda. Pertama, mereka lebih fokus terhadap pengawasan teknis administratif, sementara kita harus menjadi pengawas yang independen tetapi juga sekaligus melayani. Kita tidak sekedar hitam putih ini boleh atau tidak tetapi mencari solusi. Saya dengar di sana sistemnya akan dibangun dengan online dan sistem itu yang otomatis menolak. Misalnya ada usulan dari instansi yang tidak sesuai aturan, sistem akan menolak. Kalau itu yang terjadi --semata-mata penolakan sistem-- itu justru berbahaya karena ruang untuk berdiskusi itu kecil. Padahal sistem kan terbatas. Misalkan kita mau menjelaskan masalahnya secara detail tidak mungkin di situ. Kita perlu mengundang (klarifikasi langsung) kenapa kepala daerah melakukan ini atau itu, ketika ada penjelasan yang masuk akal kita terima. Nah, kelemahan sistem tidak bisa memberikan ruang itu dan itu harus diperhatikan.



Ketua KASN, Agus Pramusinto, saat membaca hasil kajian netralitas ASN.

Foto: VOI

Bagaimana strategi para pengambil kebijakan untuk meminimalisir potensi subjektivitas dan meningkatkan hawa kompetisi pada pelaksanaan manajemen talenta pengisian JPT pasca dihapuskannya mekanisme seleksi terbuka JPT?

- Sebetulnya sistem yang kita bangun selama ini sudah bagus. Tentu masih perlu perbaikan di sana-sini. Seleksi terbuka akan jalan baik kalau panitia seleksi tidak diintervensi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK: Bupati, wali kota, gubernur, menteri, kepala lembaga) dan mereka berani berdiri tegak independen. Praktikanya, beberapa anggota panitia seleksi justru mau dijadikan alat oleh PPK.

Terkait dengan manajemen talenta, harusnya tidak ada lagi usulan 3 besar untuk dipilih satu oleh PPK dengan alasan harus ada chemistry. Bagi saya chemistry tidak perlu jadi ukuran karena subjektif sekali. Misalnya, bupati perlu Sekda yang punya chemistry dengan bupati. Pertanyaannya: apakah chemistry hanya untuk Sekda terhadap Bupati? Kalau chemistry Sekda dengan Bupati bagus, sementara chemistry Sekda dengan jajaran kepala dinas ke bawah tidak bagus, lantas bagaimana?

Menurut saya, seseorang yang dalam manajemen talenta sudah nomer 1, maka dialah yang pantas untuk menduduki posisi yang kosong yang relevan dengan bidangnya. Ibaratnya, kalau dalam satu kelas si A nilai rapornya paling tinggi, maka dialah yang berhak mendapatkan beasiswa. Kalau si A ternyata malah tidak mendapatkan beasiswa dan dikalahkan si B dan si C yang nilai rapornya di bawah si A, keputusan itu jadi sangat aneh. Apa kata dunia nanti terhadap birokrasi kita. Si A yang rapornya sudah tinggi, secara teoritis dia memiliki kompetensi dan kinerja serta tidak ada cacat perilaku yang secara kumulatif mengalahkan yang lain. Terus mengapa harus mencari-cari alasan chemistry yang ukurannya tidak jelas? Dengan cara manajemen talenta yang benar, semua menjadi jelas, bisa dipertanggungjawabkan, dan tidak menjadi sistem PHP (Pemberi Harapan Palsu), alias sudah terbaik kok tetap tidak bisa menduduki jabatan.



Ketua KASN, Agus Pramusinto, saat membuka webinar netralitas ASN.

Bagaimana strategi pelaksanaan manajemen talenta terhadap Instansi Pemerintah Daerah yang belum memiliki Assessment Center/UPT/Assessor terakreditasi? akankah ada potensi gelombang/penggelumbungan permintaan dari Instansi Pemerintah yang belum siap melaksanakan mekanisme manajemen talenta, terhadap IP K/L/D yang memiliki Assessment Center terakreditasi?

- Sejauh ini yang saya ketahui bahwa harapannya assessment center itu kan berkualitas. Tapi memang tidak banyak yang sudah diakreditasi oleh BKN. Oleh karena itu, menjadi tugas BKN untuk meningkatkan kualitas agar semakin banyak assessment centre yang terakreditasi.

Apakah BKN juga memiliki kemampuan untuk itu? Untuk menjamin manajemen talenta bekerja memang dibutuhkan assessment centre yang memadai. Isu lain yang pernah muncul adalah adanya assessment centre yang bisa dipesan. Tentu ini harus dikawal serius agar keberadaannya betul-betul memberikan penilaian secara objektif dan bukan berdasar pesanan.

Bagaimana cara untuk meminimalisir gap antara akademisi (ataupun saintis) dengan para pembuat kebijakan? Tidak sedikit kebijakan publik yang dibuat tanpa adanya dasar teoritis atau kajian yang memadai, dan lebih mementingkan aspek politis.

- Ya memang itu selalu ada gap di antara pandangan birokrat dengan pandangan akademisi. Satu-satunya jalan memang harus bekerja sama antara akademisi dengan praktisi agar kemudian bertemu pada titik mana kebijakan itu harus mempertimbangkan aspek substansi akademik dan juga kepentingan politik. Kepentingan politik itu realitas yang dihadapi dalam setiap kebijakan publik dan itu tidak bisa dihindari. Kita tidak bisa mengatakan bahwa harus dihilangkan kepentingan politik. Itu jelas tidak bisa karena realitasnya itu ada.

Agar kebijakan berjalan baik harus ada 3 prasyarat: (1). Ada kajian akademik baik teoritis maupun empiris; (2) Ada uji publik untuk memperdebatkan isu dari berbagai pandangan yang berbeda; (3) Ada simulasi yang bisa memberikan gambaran dampak yang akan terjadi ketika pasal atau aturan itu dijalankan.

Hal yang perlu ditambahkan dari 3 kriteria tersebut adalah adanya lembaga atau organisasi yang mengimplementasikan yang memiliki struktur yang benar; dan tentu harus ada aparatur yang kompeten dan berintegritas dalam mengeksekusinya.

Kesenjangan terjadi bisa karena kualitas hasil penelitian yang buruk sehingga tidak bisa meyakinkan pengambil kebijakan. Atau, karena pengambil kebijakan yang sudah bebal karena kepentingan politiknya terlalu tinggi. Tugas akademisi adalah meyakinkan hasil penelitiannya bahwa kebijakan yang tidak berdasarkan kajian akan membuat kiamat bagi pengambil kebijakan. Kalau pengambil kebijakan sendiri kemudian terancam buruk oleh keputusannya sendiri, mungkin mereka akan memperhatikan saran akademisi. Pelibatan akademisi sudah cukup tinggi hanya saja seberapa banyak itu kemudian diadopsi itu yang masih rendah. Saya dengar misalnya kalau di banyak negara maju suara akademisi (hasil penelitian) betul-betul didengar. Jadi senekat-nekatnya pembuat kebijakan, mereka masih mendengarkan kajian akademik. Tetapi di kita peran kajian masih sekadar menjadi legitimasi kebijakan yang sudah dirancang oleh pembuat kebijakan. Dalam bahasa sederhana, pelibatan akademisi baru sekadar formalitas.

Kelinci Kura-kura

Maria Ivonne Tarigan

Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar,
Kode Etik, dan Kode Perilaku dan Netralitas ASN

Berolahraga di sisa waktu kala perjalanan dinas kerap kali menjadi rutinitas. Tepatnya di fitness centre hotel di Jawa Barat, seusai mengevaluasi netralitas ASN, saya melihat ada suatu pemandangan baru pada alat *treadmill*. Di dekat panel monitor alat tersebut saya melihat ada gambar kelinci dan kura-kura. Gambar kelinci dilengkapi tanda tambah (plus), sedangkan gambar kura-kura ditambahkan tanda kurang (minus). Menjadi sebuah pemandangan baru, karena selama ini saya memang tidak pernah melihat lambang kelinci dan kura-kura yang dipadukan dengan tanda plus dan minus pada suatu alat *treadmill*.



Asisten KASN, Maria Ivonne Tarigan, saat menyosialisasikan netralitas ASN.

Lalu, saya mulai melangkah di atas area berjalan, sambil menambah kecepatan dengan menekan lambang kelinci. Ketika saya merasakan kecepatannya masih kurang, saya kembali menekan lambang kelinci. Sebaliknya pada saat saya merasakan kecepatannya terlalu tinggi, saya menyesuaikan menurunkannya dengan menekan lambang kura-kura. Sembari berolahraga, saya membayangkan kedua hewan tersebut. Kelinci dan kura-kura merupakan dua makhluk hidup ciptaan Allah yang mempunyai karakteristik khas. Kelinci merupakan binatang yang bergerak lincah dan cepat, dengan sepasang kaki berada di bagian depan dan bagian belakang untuk berjalan, berlari, serta melompat.

Adapun kura-kura mempunyai ciri khas yakni memiliki tempurung atau cangkang yang berfungsi untuk mempertahankan diri dari serangan hewan buas lain. Dari literatur yang saya baca, ternyata kura-kura memiliki cakar di kakinya untuk membantu kura-kura berjalan di daratan. Meskipun kura-kura gerakannya lambat di daratan, tapi kura-kura juga memiliki kelebihan yakni dapat hidup di dua alam, air dan daratan. Selain itu, kura-kura memiliki usia yang panjang bahkan bisa mencapai ratusan tahun.

Berangkat dari pengalaman di atas, saya terinspirasi untuk menuliskan pemikiran bahwa kerja dan karya kita bisa dianalogkan seperti kelinci dan kura-kura. Terkadang kita berada pada kecepatan yang tinggi, tapi ada kalanya harus pada kecepatan yang sedang atau rendah. Sama seperti kedua hewan tersebut yang memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Maka sepertinya tidak ada juga suatu frekuensi kecepatan yang dianggap kurang baik atau paling baik, karena tentunya harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan sehingga membentuk suatu harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan.

Peran tangan dan jari-jari tentunya sangat penting, memegang kekuasaan penuh untuk memilih tombol kelinci atau kura-kura. Rasanya seperti itu juga dalam perjalanan karier kita. Ada waktunya kita berjalan bahkan melompat lincah untuk suatu kecepatan tinggi. Akan tetapi ada juga waktunya harus menurunkan kecepatan. Namun, tetap bertahan dan stabil dengan waktu yang lebih lama. Ini semua tidak terlepas dari adanya kekuatan di luar diri kita yang memberikan pengaruh apakah kita bergerak seperti kelinci atau kura-kura.

Para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkarya di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tentunya mempunyai riwayat pekerjaan dan jabatan yang berbeda, baik sebelum maupun saat berkarya di KASN. Jika kita meninjau kembali, mungkin ada saatnya kita berperan seperti kelinci yang energik, cepat dan cerdik. Namun, ada saatnya juga kita seperti kura-kura yang mungkin nampaknya lambat tapi juga kuat, mempunyai strategi bertahan dari serangan dan mampu bertahan hidup lebih lama dalam menghadapi berbagai tantangan.



Suasana kebersamaan di capacity building KASN 2024.

Dalam beberapa waktu ke depan, kebersamaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi bersama para pimpinan (komisioner), lima kelompok kerja di KASN, sekretariat KASN dan seluruh tenaga pendukung mungkin akan berakhir. Meskipun kami termasuk pegawai yang memiliki durasi kerja di KASN paling singkat, tapi kami mendapatkan banyak nilai-nilai baik, yang mungkin selama ini sebenarnya dipahami tetapi kerap terabaikan.

Secara khusus kebersamaan di Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku dan Netralitas ASN (NKKNet), kami memperjuangkan implementasi manajemen anti penyuapan. KASN pada 2022 lalu sudah berhasil mendapatkan sertifikasi ISO SMAP 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan juga telah ditetapkan Peraturan Ketua KASN Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Lingkungan KASN. Sekiranya nilai dasar yang sangat baik ini dibawa oleh setiap pegawai ke instansi baru di mana bertugas nantinya. Semoga bisa menjadi garam yang memberikan rasa yang baik dan menyehatkan serta juga menjadi terang di tengah kegelapan yang ada sehingga berdampak positif.

Pada akhirnya, meskipun asisten KASN sudah mendapatkan gambaran setelah beralihnya tugas fungsi lembaga KASN ke Kementerian PANRB dan BKN, namun masih ada di antara mereka yang berkeinginan untuk kembali ke instansi asalnya atau ke pilihan lainnya.

Secara khusus, para asisten KASN saat ini masih terus semangat berkarya dan bekerja, untuk menuntaskan tugas dan fungsinya sampai diterbitkannya peraturan pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang diperkirakan akan selesai pada akhir April 2024. Namun, karena asisten KASN setara dengan JPT pratama, maka kami tetap berharap Menteri PANRB memberikan kebijakan untuk mengikuti job fit pada JPT pratama yang ada di Kementerian PANRB, BKN, atau instansi pemerintah lainnya. Segala usaha telah dilakukan dan saatnya kini berpasrah kepada Sang Penguasa, semoga asa itu tetap ada.

Pada akhirnya, tidak menjadi persoalan, apakah selanjutnya akan berperan sebagai kelinci atau sebagai kura-kura, karena keduanya mempunyai kekuatan masing-masing yang hebat untuk bertahan dan memberikan dampak dalam kehidupan ini.

*Salam sehat dan semangat!
Salam Inspirasi
ASN BerAKHLAK, Bangga Melayani Bangsa
ASN Pilih Netral*



Asisten KASN, Maria Ivonne Tarigan, dalam rapat koordinasi penegakan netralitas ASN.

Menjemput Hidup yang Lebih Bahagia dengan Digital Detox

Nesia Qurrota A'yuni

Analisis Berita KASN

Kamu gampang cemas sekarang? Emosional? Terus juga kurang tidur?

Sepertinya itu tanda-tanda kecanduan gawai atau gadget. Ada perasaan takut ketinggalan sesuatu jika tidak mengecek gawai setiap waktu. Kamu juga kerap kali kecewa jika unggahanmu tidak mendapatkan likes atau komentar yang sesuai harapanmu. Singkatnya, banyak fokus kamu hanya tertuju pada kehidupan di dunia maya.

Jika sudah begitu, ini alarm kamu perlu melakukan digital detox demi hidup yang lebih baik dan seimbang.

Digital detox berarti momen ketika seseorang tidak menggunakan gawai, seperti ponsel, komputer, tablet, televisi, dan media sosial untuk sementara waktu. Hal itu dapat membuat jadi lebih fokus kepada interaksi sosial di dunia nyata dan juga kepada hal-hal yang lebih bermanfaat secara konkret.

Lalu, berapa lama biasanya digital detox sebaiknya dilakukan?

Sebenarnya tidak ada periode spesifik supaya proses digital detox berhasil. Namun yang perlu diingat, saat kamu ingin melakukannya, usahakan pada waktu yang tepat. Sebagai contoh, tidak menjauhkan gawai pada waktu-waktu efektif bekerja sehingga kamu tetap bisa terhubung dan menjalankan tanggung jawab dengan baik. Meski begitu, pada saat yang bersamaan, kamu bisa menyetop penggunaan media sosial yang tidak berhubungan dengan tugasmu.

Untuk memulai digital detox, kamu tidak harus secara langsung menjauhkan diri dari gawai dan media sosial. Kamu bisa melakukannya dengan perlahan tapi pasti. Misalnya dengan mulai mematikan notifikasi atau logout media sosial terlebih dahulu. Untuk lebih lengkapnya, simak cara-cara memulai digital detox di bawah ini.

1. Jauhkan atau Tutup Ponsel saat Sedang Berinteraksi Langsung

Saat berinteraksi dengan sesama, sebaiknya kamu menjauhkan atau membalikkan ponselmu ke bawah. Sebab jika tidak, notifikasi yang muncul akan mengurangi kualitas dari interaksimu.

Pendiri DC Counseling and Psychotherapy Center di Amerika Serikat, Elisabeth LaMotte, mengatakan, makin banyak energi yang dipusatkan pada gawai, akan makin berkurang energi yang diberikan terhadap siapa pun yang sedang berada dalam satu ruangan.

2. Off Weekend

Kamu bisa mengatur waktu tertentu untuk tidak menyentuh gawaimu sama sekali. Pada akhir pekan misalnya. Jadi, hari liburmu bisa kamu alokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Kamu bisa berkumpul dengan keluarga, berolahraga, menikmati alam, dan melakukan hobimu.

3. Fokus pada Satu Gawai

Saat tengah fokus mengerjakan tugas di komputer, kamu bisa meletakkan ponselmu di laci atau tempat lainnya. Ini akan membantumu berkonsentrasi penuh pada pekerjaan tersebut karena potensi distraksi dari ponsel telah diminimalkan.

4. Log out Sosial Media saat Hari Kerja

Media sosial menjadi salah satu distraksi terbesar yang bisa mengalihkan fokus seseorang. Oleh karena itu, saat sedang bekerja, kamu bisa log out dari akun media sosialmu. Ini akan membantumu untuk bisa bekerja secara efisien. Kamu tidak akan kehilangan fokus karena curi-curi waktu untuk membuka linimasa, sekadar membalas pesan di media sosial atau sekadar melihat unggahan temanmu.

Saat kamu memulai digital detox, itu tandanya kamu telah menyimpan sebagian waktu untuk hal-hal yang lebih produktif. Kamu juga memiliki peluang untuk mencapai hidup yang seimbang. Jika dijabarkan, berikut ini manfaat yang akan kamu dapatkan setelah melakukan digital detox.



5. Temukan Hal yang Bisa Mengalihkan Perhatian dari Gawaimu

Kamu perlu mengidentifikasi berbagai aktivitas yang bisa mengalihkanmu dari ketergantungan gawai. Carilah aktivitas yang bermanfaat tapi cukup menyenangkan bagimu. Sebagai contoh, membaca buku, melukis, memasak, berkebun, olahraga, dan masih banyak lagi.

Meningkatkan Kualitas Tidur

Untuk mencapai tidur yang berkualitas, orang dewasa membutuhkan 7-9 jam tidur per harinya. Hal itu akan membantu seseorang lebih berkonsentrasi dan produktif. Digital detox membantu untuk mencapai kebutuhan tersebut.

Memperbaiki Suasana Hati

Kadang, membuka media sosial justru akan membuat suasana hati menjadi kurang baik. Hal itu karena kita melihat unggahan yang tidak sesuai dengan prinsip kita, yang memuat kebencian, hoaks, dan masih banyak lagi. Dengan rehat sejenak dari aktivitas di media sosial, kamu otomatis telah memperbaiki suasana hati.

Mencegah Gangguan Kecemasan

Berbagai cerita yang diunggah di media sosial kebanyakan tidak mencerminkan kehidupan asli seseorang. Namun, ketika terlalu intens melihatnya, kamu bisa menjadi terpengaruh atau FOMO (fear of missing out). Kamu akan cemas jika ketinggalan informasi atau tren di media sosial. Dengan digital detox, kamu bisa mencegah diri dari ancaman perilaku FOMO.

Mencapai Work-Life Balance

Mengurangi bermain gawai membantumu untuk fokus terhadap tugas yang menjadi tanggung jawabmu. Alhasil, kamu bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sehingga bisa menggunakan waktu di luar itu untuk agenda pribadimu. Ketika work-life balance telah tercapai, biasanya kamu akan lebih bahagia. Ide-ide dan inovasi pun akan lebih mudah muncul.

**Nah begitulah digital detox bekerja.
Tertarik untuk mencobanya?**



Penandatanganan perjanjian kerja sama bersama akademisi FISIPOL UGM terkait penguatan dan penataan kelembagaan
7 Agustus 2023



Peresmian GRHA Meritokrasi dan penguatan budaya kerja KASN
10 Agustus 2023



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama KASN dengan Politeknik STIA LAN Bandung
30 Agustus 2023



Upacara HUT Kemerdekaan RI ke- 78
17 Agustus 2023



Pembinaan persiapan audit surveillance penerapan ISO 9001:2015
8 September 2023



Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI
9 September 2023



Rapat Koordinasi Perjanjian Kerja Sama antara KASN dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
12 September 2023



Akselerasi manajemen talenta dalam pengembangan karier PNS bersama Tanoto Foundation
13 September 2023



Rapat koordinasi bersama Desk Pemilu Kemenko Polhukam
22 September 2023



Prof. Agus Pramusinto, menjadi narasumber dalam kegiatan Ikrar Bersama dan Penandatanganan Pakta Integritas Netralitas ASN di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
26 September 2023



Pelantikan Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara
2 Oktober 2023



KASN Me-launching Laboratorium Sistem Merit di Kabupaten Manggarai Barat
4 Oktober 2023



Ketua KASN Hadiri Kegiatan diskusi strategis “Masa Depan Meritokrasi Pemerintahan Indonesia Pasca Revisi UU ASN” yang diselenggarakan BRIN.
19 Oktober 2023



KASN Teken Kerja Sama dengan Ditjen APTIKA Kemenkominfo Jelang Pemilu Serentak
26 Oktober 2023



Rakor Paguyuban Kementerian PANRB
16 November 2023



KASN Lakukan Launching Logo ASN Pilih Netral serta Sosialisasi Netralitas ASN
22 November 2023



Komisi Aparatur Sipil Negara Lakukan Rapat Koordinasi Penyiapan Transformasi KASN Bersama Kementerian PANRB
15 Januari 2024



Kick off Meeting Peningkatan Kualitas Penerapan Sistem Merit untuk Instansi Pemerintah yang menjadi Target Prioritas Tahun 2024
16 Januari 2024



Hadiri Rakor Netralitas yang diselenggarakan BKN, Ketua KASN Ingatkan ASN untuk Tidak Terlibat Politik Praktis
6 Februari 2024



KASN Melakukan Rapat Tim Satuan Tugas Pemilihan Umum bersama dengan Kementerian PANRB dan BKN
23 Februari 2024



Ketua KASN Bertemu dengan Perwakilan *Australian Public Service Commission* untuk Membahas Masa Depan Manajemen ASN di Indonesia
28 Februari 2024



Ketua KASN Bertemu dengan Perwakilan NPA Jepang Bahas Pelaksanaan Sistem Merit di Indonesia
5 Maret 2024

Pengarah: Ketua KASN | **Penanggung Jawab:** Kepala Sekretariat KASN | **Pemimpin Redaksi:** Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat | **Redaktur:** Nesia Qurrota A'yuni | **Editor:** Dwindi Mauwaldi | **Fotografer:** Ariel Delya Alif Pratomo, Clara Mutia Yoka, Jane Kasia Helena, Maurits Jonathan, Silka Amyra | **Sekretariat:** Agum Ath Thariq, Dina Khairani, Dinda Rian Octafianni, Iqbal Fadil, Magnus Petronius Waruwu, Mertty Pasaribu, Zahra Nurul Fadhilah

WWW.KASN.GO.ID

